

**PRAKTIK JUAL BELI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
UNTUK AKTIVASI KARTU PERDANA PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN SURAT EDARAN (SE)**
BRTI NOMOR 01 TAHUN 2018
(Studi Kasus di Desa Betiting Cerme Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Rizky Maulana

NIM. C72218095



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Rizky Maulana

Tempat/Tgl Lahir Gresik, 20 Mei 2000

NIM C7221905

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dinalis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebut dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya 5 Mei 2023

Penulis,

Rizky Maulana



Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana NIM C72218095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP : 197409102005012001



Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana NIM C72218095 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 14 juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana NIM C72218095 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 14 juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Pengaji I,

Dr. Umi Chaidaroh, SH,MHI
NIP : 197409102005012001

Pengaji II

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP : 196806271992032001

Pengaji III,

Dr H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP : 197307262005011001

Pengaji IV

Moh. Bagus, M.H.
NIP : 199511052022031001

Surabaya, 22 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Maulana
 NIM : C72218095
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
 E-mail address : r.maulana2502@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (_____)

yang berjudul :

Protektif Juar Beli Nomor Induk Kependidikan Untuk
Aktivasi Kartu Perdana Perspektif Fatwa DSN MUI
110/DSN/MUI/1X/2017 Dan Surat Edaran (SE) BRTI Nomor 1 Tahun 20

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Mei 2023

Penulis

(Rizky Maulana,
nama lengkap dan tanda tangan)



Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul Praktik Jual Beli Nomor Induk Kependudukan Untuk Aktivasi Kartu Perdana Perspektif Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Surat Edaran BRTI nomor 01 tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Betiting Cerme Gresik). Mengacu pada penelitian yang sedang ditulis, ada 3 rumusan masalah 1) Bagaimana Praktik Penjualan Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?, 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem jual beli Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?, 3) Bagaimana analisis Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) No 01 Tahun 2018 terhadap penjualan Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif di kios pulsa Betiting Cerme Gresik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisa data secara kualitatif, bertujuan untuk mengetahui jenis penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1) Praktik Penjualan Nomor Induk Kependudukan milik orang lain untuk aktivasi kartu perdana di Kios pulsa Betiting ditawarkan penjual dengan harga Rp. 10,000.00-, per nomor, alasan pembeli menyutujui tawaran penjual karena pembeli tidak dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan miliknya sendiri. 2) jual beli Nomor Induk Keluarga untuk aktivasi kartu perdana tersebut melanggar ketentuan syarat jual beli dalam Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 yaitu tidak memenuhi syarat objek atau barang yang diperjualbelikan, karena bukan milik si penjual. 3) Jual beli Nomor Induk Kependudukan milik orang lain dilakukan oleh penjual dengan cara menawarkan jasa pengaktivisan Kartu Perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan orang lain penjual dengan harga Rp. 10,000.00-, per nomor melanggar ketentuan (SE BRTI) Nomor 01 Tahun 2018, karena penjual membantu pembeli meaktivasi kartu perdana dengan menggunakan data pribadi milik orang lain.

Diharapkan pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait setiap ketentuan perlindungan perlindungan data pribadi, agar masyarakat lebih peduli terkait pentingnya privasi data pribadi, sehingga masyarakat dapat melakukan aduan atau bertindak sesuai kewenangan hukum jika terdapat aktivitas yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Pembeli diharapkan lebih mengerti terkait barang apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti data pribadi milik orang lain

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
PERSETUJUAN PUBLIKASI	3
PENGESAHAN.....	4
ABSTRAK.....	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TRANSLITERASI.....	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian	19
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KETENTUAN FATWA DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN SE BRTI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG JUAL BELI NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN UNTUK AKTIVASI KARTU PERDANA	29
A. Konsep Jual Beli.....	29
B. Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.....	37
C. Ketentuan Surat Edaran BRTI Nomor 01 Tahun 2018	39
BAB III PRAKTIK PENJUALAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN UNTUK AKTIVASI KARTU PERDANA DI DESA BETTING CERME GRESIK.....	46
A. Gambaran Umum Kios Betting.....	46
1. Profil Kios	46
2. Produk dan Layanan Kios	47

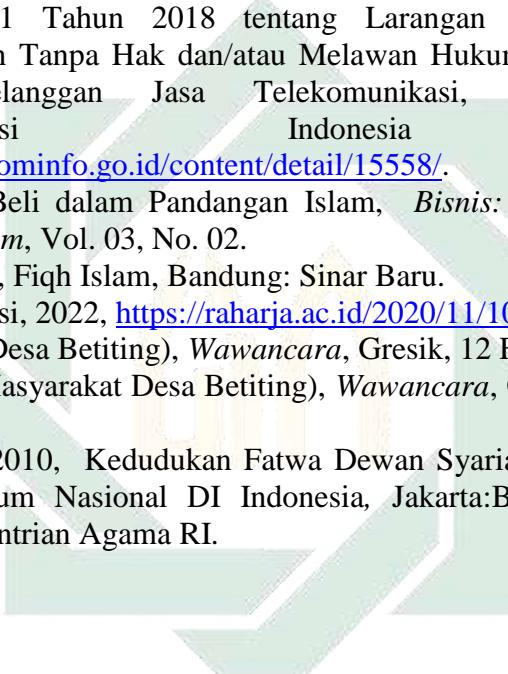
B. Praktik Jual Beli Nomor Induk Kependudukan Untuk Aktivasi Kartu Perdana di Kios Betiting Cerme Gresik.....	48
1. Mekanisme Jual Beli	48
2. Latar Belakang Penjualan	50
3. Respon Pembeli dan Masyarakat Sekitar	53
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN UNTUK AKTIVASI KARTU PERDANA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN SE BRTI NOMOR 01 TAHUN 2018	55
A. Praktik Jual Beli NIK Untuk Aktivasi Kartu Perdana di Desa Betiting Kecamatan Cerme dalam Perspektif Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 ...	55
B. Praktik Jual Beli Nomor Induk Kependudukan Untuk Aktivasi Kartu Perdana di Desa Betiting Kecamatan Cerme dalam SE BRTI Nomor 01 Tahun 2018	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqih Mūāmālāh Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman as-Sa“di, Dkk, 2008, *Fiqih Jual-Beli: Pnaduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Ahmad (Pembeli Kartu Perdana), Wawancara, Gresik, 11 Februari 2023
- Aini (Pembeli dan Masyarakat luar Desa Betiting), *Wawancara*, Gresik, 13 Februari 2023.
- Al-Shan’ani, *Subul as Salam Juz x*, Beirut: Darul Fikr.
- Andi (Pemilik Konter Betiting Cerme), *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2023
- Anisa Kurniasih Nurul, 2018, Hadiah Dalam Akad Wadiyah Di Bank Syari’ah Analisi Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012, Banten:UIN SMH Banten.
- Arum Sutrisni Putri, 2022, Sumber sejarah primer dan sekunder <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/150000569/sumber-sejarah-primer-dan-sekunder?page=all>.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur”an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- Dian Anggraini, 2019, Prosedur Pengelolaan Surat Di PT Pos Indonesia Palembang 3000, Palembang:Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Fadhel, 2020, Jual beli kartu keluarga dan nomor induk kependudukan melalui social media (Tinjauan Hukum ekonomi syariah dan hukum positif), Tesis-Uin Antasari.
- Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli, <https://ubico.id/wpcontent/upload/2019/02/110-Akad-Jual-Beli.pdf>.
- H. A. Khumedi Ja’far, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Hendi Suhendi, 2011, *Fikih Mūāmālāh*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayatul Adha, 2020, Dampak Peraturan Pemerintah (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017 Terhadap Penjualan Kartu Perdana di PT Telesindo Shop ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, Skripsi-Uin Suska Riau. <https://gresikkab.go.id/info/geografi/>, pada 8 Februari 2023 pukul 09.00 WIB
- Imron Mustofa, 2021, Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no.1.
- Inna (Masyarakat Desa Betiting), *Wawancara*, Gresik, 12 Februari 2023
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.
- Moch. Zainul Arifin, 2014, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* Surabaya: UINSA Press.
- Muhammad Yazid, 2017, *Ekonomi Islam*, Surabaya : Imtiyaz.
- Muhammad Yazid, 2017, *Fiqh Mūāmālāh Ekonomi Islam*, Surabaya: IMTIYAZ.
- Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Aktivasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi,<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150534/permenkominfo-no-12-tahun-2016>.

- Radian Adi Nugraha, 2012, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skripsi – UI, Depok.
- Rexy, 2022, Penegakan Hukum Aktivasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain, Mimbar Keadilan.
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2014, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2.
- SE BRTI Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum untuk Keperluan Aktivasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15558/>.
- Shobirin, 2015, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 03, No. 02.
- Sulaiman Rasyid, 1990, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru.
- Syafnidawaty, Observasi, 2022, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>.
- Syamsul (Masyarakat Desa Betiting), Wawancara, Gresik, 12 Februari 2023
- Wendi (Pembeli dan Masyarakat Desa Betiting), Wawancara, Gresik, 12 Februari 2023
- Yeni Salma Barlinta, 2010, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia, Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A